

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KOORDINASI KARYAWAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)
KABUPATEN JENEPONTO**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

21/05/2021

1exp
Sub. Alumni

P/0073/ADM/2020

241

5'

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zainuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 105610474813

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 09 Februari 2021

Yang Menyataka



Zainuddin

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Koordinasi
Karyawan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Zainuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 105610474813

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I

Dr. Fatmawati., M. Si

Menyetujui:

Pembimbing II

Dr. Abdi., M. Pd

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Hj. Ihyani Malik., S. Sos., M. Si

NBM: 730727


Nasrul Haq., S. Sos., M. PA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

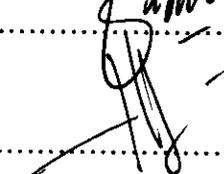
Telah di terima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0160/FSP/A.4-II/II/42/2021 Sebagai Salah Satu Syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan dimakassar pada Hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari tahun 2021 M



TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
 <u>Dr. Hj. Ihyani Malik., S. Sos., M. Si</u> NBM: 730727	 <u>Dr. Burhanuddin., S. Sos., M. Si</u> NBM: 1084366

DEWAN PENGUJI

1. Abdul Kadir Adys., SH. MM (.....)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati., M. Si (.....)
3. Dr. Hj. Fatmawati., M. Si (.....)
4. Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu., S. T. M. Si (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”

Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah . Memberikan nikmat begitu besar terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulisan dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salam dan Shalawat kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad SWA, yang diutus oleh Allah di permukaan bumi ini sebagai suri tauladan yang patut di contohi dan menjadi rahmat bagi semesta alam telah menciptaka Allah SWT.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan mendorong dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Kepada orang tua, Ibu Bapak serta adik saudara dan seluruh keluarga yang membantu baik kebutuhan moral dan materi serta selalu memberikan do,a, motivasi dan arahan semangat dan dukungannya kepada penulis.
2. Bapak PROF. Dr. H. AMBO ASSE, M.Ag, : Selaku Rektor universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. Ir. H. Abdul Rahim Nanda, M.T, : Selaku Wakil Rektor 1 . Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum Selaku Rektor II . Dr. Muhammad Tahir, M. Si : Selaku Rektor III . Ir. H. Muh, Saleh Mallo, M.M, : Selaku Rektor IV.

3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si, : Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, : Selaku Wakil Dekan I . Andi Luhur Priyanto, S.IP, M.Si, : Selaku Wakil Dekan II . Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si, : Selaku Wakil Dekan III . M.Amin Umar, S.Ag, : Selaku Wakil Dekan IV.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.PA, : Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara (FISIPOL) Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos, M.PA, : Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara (FISIPOL) Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Hj. Fatmawati Andi Mappasere, M.Si Selaku Pembimbing I, Dr. Abdi, M.Pd, Selaku Pembimbing II, yang telah menjaga waktu memberikan bimbingan arahan sesuai penulisan.
6. Abdul Kadir Adys, SH., MM Selaku Penguji I, Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si Selaku Penguji II, Dr. Hj. Fatmawati Andi Mappasere, M.Si Selaku Penguji III, Dr. Hafiz Elfiansyah P. M.Si Selaku Penguji IIII
7. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang Ilmunya yang tak terhingga dan begitu berharga kepada penulis serta semua karyawan dan staf fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan arahan dalam pengurusan system akademik yang ada di fakultas.
8. keluarga besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta adik-adik yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Selaku Bagi Teman-Teman KKP Angkatan XIV Tahun 2017 kelurahan masale satu bulan dan lanjut lagi di kecamatan panakkukang satu bulan kota Makassar Sulawesi Selatan yang menjadi tempat berbagai kehidupan selama dua bulan lamanya di lapangan kantor kecamatan panakkukang kota Makassar Sulawesi selatan.

10. Selaku Bagi Teman-Teman SMA NEGERI 1 BISSAPPU BANTAENG Angkatan 2009 Jurusan IPS Alamat Jalan BELANG. TAGANI DEKAT TERMINAL KOTA BANTAENG yang memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sebagai manusia biasanya menyadari masih banyak kekurangan dan tidak terlepas dari kesalahan dalam menulis skripsi karena kesalahan adalah kodrat dasar dan hal insaniyah bagi semua umat manusia. maka memberikan saran pemikiran dan kritikan dari pembaca yang semangatlah di harapan oleh penulis demi untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna di masa akan datang. Dan semoga Allah SWT meridhoi skripsi ini serta memberikan manfaat bagi semua pihak Amiin. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari Sempurna, walaupun demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak Yang berperang dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Makassar- 09 Februari 2021



ZAINUDDIN
NIM 105610474813

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
ASTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Konsep Strategi.....	7
B. Konsep Pemerintah.....	9
C. Strategi Koordinasi.....	12
D. Teori Koordinasi.....	15
E. Kerangka Pikir.....	18
F. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Pengabsahan Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	28
B. Deskripsi Hasil penelitian dan pembahasan.....	31
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	50
B. Implikasi Penelitian.....	51
DAFTAR PUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
R IWAYAT HIDUP	



ABSTRACT

Zainuddin,2021. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Koordinasi Karyawan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto dibimbing Oleh Dr. Fatmawati, M.Si dan Dr. Abdi, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model strategi pemerintah daerah dalam koordinasi Zainuddin ,2021. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Koordinasi Karyawan Pembangunan Pembangkit pembangunan dan kantor PLTB Jeneponto serta faktor apa yang penghambat dan pendukung strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informasi dalam ini adalah 5 orang yang ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan mengenai potensi pembangkit listrik tenaga Bayu/ angin (PLTB) di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto perlu juga adanya peningkatan kualitas pelayanan secara langsung dan peningkatan angin dengan panjang 63 m dan tinggi tower 135 m. Kecepatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan tetapi semua proses kerja sudah berjalan dengan baik dan transparansi yang cukup memuaskan untuk publik dengan terbukaan yang ada dalam sistem perusahaan tersebut yang memaparkan secara umum hal-hal yang dapat diketahui secara umum demi kepentingan umum.

Kata kunci: strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan, pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

ABSTRACT

Zainuddin, 2021. The Regional Government's Strategy in coordination of employees for the development of a bayu power plant (PLTB) in Jeneponto regency was guided by Dr. Fatmawati, M.Si dan Dr. Abdi, M.Pd

This study purposed to find out how the regional government strategy model in the coordination of the development and the Jeneponto PLTB office and the obstacles and support factors, for the local government's strategy in developing PLTB development in Jeneponto regency. This study used gualitative with descriptive type. The number of invormants in this study where 5 people who were determined by purposive sampling technigue. Data collection technigues used observation, interviews and documentation. The results showed tha the potential for bayu/ wind power plant (PLTB) in Binamu district, Jeneponto regency needed to improve the quality of services directly and increase the wind with a length of 63 m and a tower height of 135 m. The speed of service to people who needed

it,hence all work processed had been running well and the transparency was satisfactory of

The public with the openness that existed on the company's system' which described generally in general for the public interest.

Keywords: local government employee coordination Strategy, wind power plant development.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini teknologi sudah menjadi bagian dari hidup manusia sehingga teknologi menjadi kebutuhan utama manusia, hal ini memicu pemikiran manusia untuk terus berinovasi agar teknologi dapat membuat seluruh aktifitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Teknologi saat ini sudah membantu banyak orang dalam segala hal sehingga manusia memiliki kecenderungan terhadap teknologi. sehingga hal ini membuat listrik menjadi salah satu kebutuhan primer manusia. (PLTB) dengan Pemerintah Kabupaten Jeneponto Pertumbuhan Ekonomi dan laju perkembangan industry suatu provinsi sulawesi selatan. PLTB di Kabupaten Jeneponto. Di Indonesia konsumsi listrik setiap tahun terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan kebutuhan listrik dikemudian hari yang diperkirakan dapat tumbuh rata-rata 6,5% pertahun hingga tahun 2020. Jumlah ini akan terus sebab itu harus ada suatu gagasan baru mengenai sumber-sumber penghasil energy dan rumusan program-program pelaksanaan dengan efisiensi maksimal. merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik bayu menggunakan energy bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin

sebagai generator. Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berada di Kabupaten Jeneponto Sulawesi selatan. Terletak di Desa lengke-lengese, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, PLTB ini siap menghasilkan tenaga listrik dari 20 kincir angin atau wind turbin generator. Turbin berkapasitas 2,5 MW pada 20 kincir tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 75 Mega Watt (MW) dan di perkirakan akan mampu mengalirkan listrik 70.000 pelanggan di Sulawesi selatan dengan daya listrik rata-rata 900 volt Ampere. PLTB Jeneponto terpasang di lahan seluas 100 hektar, dengan jumlah 20 turbin yang tingginya mencapai 80 meter dan baling-baling sepanjang 52 meter pembangun. SDM memiliki pendirian PLTB karena memiliki kecepatan angin yang bagus yaitu 7 meter per detik (m/s). PLTB dengan kapasitas 50 MW, berlokasi di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Sulawesi selatan pembangun PLTB tersebut tidak lain adalah untuk mencapai target baruan energy nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025 serta upaya penyediaan listrik yang lebih terjangkau masyarakat PLTB Jeneponto.

Oleh karena itu, kemajuan suatu pembangunan PLTB Jeneponto di tentukan pula bagaimana kualitas pembangunan bangsa-bangsa di Negara berkembang di dunia termasuk di Indonesia, monopoli pemerintah yang kuat dalam akses terhadap sumber daya manusia ini mulai di tinggalkan di era pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governancese* bagai sebuah pradigma dapat terwujud bila ketiga pilar pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu Negara, sector swasta, dan

menjadi andalan Indonesia dalam rangka meningkatkan devisa Negara disektor non migas. Adanya krisis ekonomi, sektor pembangunan PLTB di harapkan menjadi sumber pertumbuhan yang paling cepat, di karenakan infrastruktur pembangunan tidaklah mengalami kerusakan, hanya saja faktor keamanan yang menyebabkan pembangunan PLTB Jeneponto mancanegara mengurungkan kepergiannya ke Indonesia.

Pemerintah Daerah dihadapkan dengan dua masalah sekaligus, yang pertama adalah kenyataan bahwa pembiayaan untuk menjalankan pemerintahan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sangat besar, di sisi lain daerah tersebut merupakan daerah yang minim sumber daya manusia. Oleh karena itu jalan yang di tempuh adalah membangun sektor-sektor . Untuk merealisasikan tujuan tersebut banyak usaha yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengembangkan sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan warga masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Salah satu yang dikembangkan oleh pemerintah adalah sektor pembangunan PLTB di kabupaten Jeneponto di mana pengembangan dalam koordinasi karyawan atau pegawai pada kantor PLTB di kabupaten Jeneponto, merupakan rangkaian kegiatan dalam penerimaan pegawai yang memanfaatkan potensi pembangunan sebagai PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), baik potensi berupa pemandangan alam kawasan pertanian maupun dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakat petaninya. Bertujuan untuk memperluas

wawasan pengetahuan, pengalaman Infrastruktur pembangunan PLTB Jeneponto dan hubungan karyawan di bidang perkantoran yang meliputi dalam koordinasi karyawan, dalam kantor PLTB Jeneponto. di samping itu yang termasuk dalam pembangunan PLTB Jeneponto adalah sumber daya manusia. berpaduan antara keindahan alam, kehidupan masyarakat pedesaan dan potensi pembangunan PLTB, bila mana ditata secara baik dan di tangani secara serius dapat mengembangkan daya tarik pembangunan PLTB bagi satu daerah tujuan pembangunan. melestarikan lingkungan, memberikan desain lingkungan yang estetik bila dikelola dan di rancang dengan baik. Dengan berkembangnya pembangunan di satu daerah tujuan akan memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain bahwa fungsi pembangunan PLTB Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model strategi pemerintah daerah dalam koordinasi Pembangunan dan kantor PLTB Jeneponto?
2. -faktor apa yang penghambat dan pendukung strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan PLTB di Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan pada kantor PLTB Jeneponto
2. Untuk mengetahui model kebijakan pada kantor PLTB Jeneponto dalam meningkatkan pembangunan PLTB Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan koordinasi karyawan pada kantor dan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerahnya;
- b. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi pihak pembangunan PLTB Jeneponto dalam implementasi kebijakan koordinasi karyawan yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat di Jeneponto;
- c. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi daerah dan pihak kantor swasta lain yang ingin membuat kebijakan terkait pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat Jeneponto.

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Program Strata Satu(S1) Universitas Muhammadiyah Makassar;
- b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian;

- c. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun pengkajian terkait implementasi kebijakan strategi pemerintah dalam koordinasi karyawan pada kantor PLTB Jeneponto di Kabupaten Jeneponto;
- d. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi tambahan dalam Ilmu Administrasi Negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani, yaitu *strategos* atau *stretaus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* memiliki *generalship* atau sesuatu yang di kerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang⁴. Menurut (Heene dkk, 2010) Penggunaan kata *strategos* itu dapat di artikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang di miliki.

Strategi adalah rencana yang di satukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan organisasi dengan tantangan lingkungan dan di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi Menurut SAKIP LAN-RI (Salusu, 1996) strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program sebagai berikut:

- a. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh yang berwenang untuk di jadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujud dan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah.

- b. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan strategi kebijakan perlu memperhatikan beberapa aspek, di antaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan *consensus builders*. Sebuah organisasi pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, di perlukan penetapan prioritas, kunci utama dari prioritas adalah kesadaran akan tahapan, yaitu hal yang perlu di kerjakan terlebih dahulu sebelum hal yang lain. Proses konstruksi strategi memainkan peranan yang penting, untuk membantu membentuk konsensus tidak hanya tentang wacana luas tentang masa depan sebuah organisasi serta tujuan jangka pendek dan menengah, tapi juga merupakan bagian yang penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pembangunan konsensus (*consensus building*) tidak hanya penting sebagai bagian untuk mencapai stabilitas social dan politik, tapi juga menggiring kepada "ownership" kebijakan dan institusi yang dapat meningkatkan peluang dalam mencapai tujuan.

Adapun tujuan dari strategi adalah untuk memenuhi sasaran yang di atur dalam kebijakan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tujuan tersebut bisa *offensive* (menyerang), bisa *defensive* (bertahan), ataupun bisa juga mempertahankan *status quo* politik. Adapun hasil yang di inginkan adalah memaksa musuh untuk menerima persyaratan yang di bebaskan kepada mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, strategi dapat di artikan sebagai suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi untuk memastikan tujuan dapat tercapai dan terlaksana dengan efektif. Strategi yang di maksud adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mengatasi permasalahan pokok pembangunan daerah dan di sesuaikan dengan lingkungan internal ataupun eksternal organisasi serta kemampuan dan sumber daya organisasi sehingga mampu mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

B. Konsep Pemerintah

Lahirnya pemerintahan pada awalnya untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat menjalankan aktifitasnya dengan aman. Dalam suatu kelompok, untuk menjaga pemenuhan hak dan kewajiban serta ancaman dari luar, maka harus ada yang memerintah. Menurut Rousseau (Ndraha, 2005) kekerasan (kekuatan) tidak dapat menegakkan hak dan kewajiban, dan yang terkuat tidak akan pernah cukup kuat untuk menjadi "tua. Oleh sebab itu, pemerintahan tidak di bangun atas dasar kekuatan kelompok semata antara satu dengan yang lainnya, melainkan di bangun atas dasar kontrak sosial. Kontrak sosial yang di maksud merupakan perjanjian antara pihak yang memerintah dengan yang di perintah, karena pada dasarnya manusia sebagai individu yang memiliki hak kebebasan sebagai hak pribadinya, akan tetapi sehubungan dengan perlu adanya individu lain untuk mengamankan harta bendanya, maka ia memberikan hak kepada individu atau kelompok lain untuk memerintah dengan tujuan utamanya mengamankan dan menjaga

harta benda dari pihak yang di perintah. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang di tandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan di katakan sebagai suatu di siplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan, dan pada pasal 3 pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang di pimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Pemerintahan dapat di pahami melalui dua pengertian:

Di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Pelaksanaan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan daerah membagi urusannya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan di atas di bagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Dalam urusan pemerintahan yang konkuren, pemerintah mempunyai urusan wajib sebagai berikut:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan dalam ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, pemerintah daerah mempunyai peran dalam menjaga stabilitas di daerahnya dan tidak berdampak pada stabilitas nasional, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Pada dasarnya pemerintah harus mempunyai cara bagaimana mempertahankan dari ancaman, tantangan yang di hadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman secara lebih realistis. Untuk waktu yang dapat di perhitungkan ke depan, keamanan terhadap ancaman internal masih akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan ekonomi, menjadikan upaya bina-bangsa menjadi soal serius. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya di tafsirkan sebagai komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman. Masalah pokok, seperti apa cara dari pemerintah daerah yang paling efektif dan efisien untuk menghadapi sumber dan watak ancaman-ancaman tertentu dan harus di ketahui dengan pasti alasan timbulnya ancaman-ancaman tersebut.

C. Strategi koordinasi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti “seni peperangan”. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang di tujuhkan. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat mencapai tujuan. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu: *stratagos*, yang berarti memimpin.

Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut dan prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter adalah suatu alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Stephanie K. Marrus adalah suatu proses penawaran rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi. Menurut Stainer dan Miner strategi adalah penempatan misi perusahaan, penempatan sasaran organisasi dalam mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Strategi adalah suatu cara yang telah di rencanakan untuk proses pencapaian target seperti dalam hal koordinasi pegawai yang memiliki kinerja yang baik. Strategi biasa terkait dengan kegiatan pencapaian keterampilan sebagai pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok kebijakan dan rangkaian tindakan sebuah organisasi, yang memfokuskan proses-proses manajemen strategi dalam suatu perusahaan, merupakan suatu syarat yang perlu bagi keberhasilan manajemen perusahaan. Strategi merupakan langkah yang di lakukan setiap perusahaan untuk dapat mencapai tujuan rangka.

Strategi merupakan arus keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada perkembangan suatu strategi. Strategi yang efektif yang membantu tercapainya sasaran, proses manajemen strategi adalah cara dengan jalan di mana perencanaan

merupakan saran untuk mencapai tujuan akhir. Keputusan ini mencakup definisi dengan bisnis, produk dan pasar yang harus di layani. Seperti yang di ungkapkan Carl van Clausewit bahwa “strategi terbaik akan menjadi amat kuat, mula-mula secara umum lalu kemudian dengan tujuan tertentu tidak ada hukum yang lebih jelas dan lebih sederhana untuk strategi selain menyatukan kekuatan”.

Strategi melalui berbagai tahap berbagai proses, secara garis besar strategi melalui tiga tahap:

a. Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu di lakukan adalah merumuskan strategi yang akan di lakukan. Di dalamnya adalah pengembangan tujuan, melalui peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan dan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan suatu strategi alternatif, dan memilih strategi untuk di laksanakan.

b. Implementasi Strategi

Setelah kita memilih strategi yang telah di tetapkan maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang di tetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi tersebut sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dalam seluruh unit dan anggota organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang di laksanakan kembali bagi suatu organisasi dan evaluasi sangat di perlukan untuk memastikan suatu sasaran yang telah di capai.

Menurut Hadawi nawawi rekrutmen adalah proses mendapatkan calon tenaga kerja yang kualifaid/pekerja utama di lingkungan suatu organisasi perusahaan. Menurut Melayu S.P Hasibuan rekrutmen adalah masalah penting dalam mengadakan tenaga kerja. Jika penarik berhasil artinya banyak pelamar yang memasukkan lamarannya peluang untuk mendapatkan karyawan yang baik terbuka lebar, karena perusahaan dapat memilih yang terbaik dari yang terbaik.

Menurut Dr. Husein Umar rekrutmen adalah suatu kegiatan yang mencari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Sumber-sumber di mana dapat calon karyawan yang dapat mencari melalui macam-macam sumber, misalnya lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja, biro-biro konsultan, melalui iklan di media masa dan tenaga kerja dari dalam organisasi itu sendiri.

Organisasi publik secara berkala koordinasi pegawai untuk menambah tenaga kerja SDM. Keberhasilan rekrutmen sangat di tentukan oleh ematangan perencanaan SDM sebelumnya. Dengan demikian perencanaan SDM merupakan pedoman yang dapat digunakan dalam proses seleksi pegawai. Kematangan perencanaan SDM itu sendiri dapat di lihat dari besarnya usaha yang di lakukan oleh SDM dalam bekerja. Jadi seleksi pegawai adalah serangkaian langkah kegiatan yang di gunakan untuk

memutuskan apakah pelamar di terima atau tidak. Bila seleksi di laksanakan dengan tidak tepat, upaya-upaya sebelumnya tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu kunci sukses dari seleksi pegawai adalah manajemen personalianya.

D. Teori koordinasi

Sebagai tujuan untuk mencapai hasil yang spesifik, biasanya di nyatakan dalam bentuk sasaran-sasaran yang telah di tentukan oleh manajemennya. Tujuan telah di selenggarakan koordinasi untuk mengembangkan keinginan-keinginan tertentu yang harus di penuhi, supaya organisasi dapat eksis. Menurut SP. Siagian di adakannya koordinasi untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pegawai yang di anggap memenuhi standar organisasi. Adapun tujuan koordinasi meliputi:

- a. koordinasi sebagai alat keadilan sosial. Keadilan sosial lebih berpihak kepada kepentingan publik secara umum, bukan berkiblat pada kepentingan spesifik yang harus di capai organisasi
- b. koordinasi sebagai teknis untuk memaksimumkan efisiensi, merupakan sebuah rekrutmen yang biasanya di lakukan secara ketat, agar dapat menjanging pegawai yang berkualitas.
- c. koordinasi sebagai strategi responsivitas politik. Hal ini di sesuaikan dengan gejolak di suatu negara masalah-masalah di perbatasan, perubahan kebijakan politik yang

dibuat. Dengan kondisi yang berubah-ubah sangat mungkin kebutuhan SDM secara sector berubah-ubah pula.

Ketiga tujuan koordinasi tersebut masing-masing memiliki faktor dan nilai yang berbeda. Khususnya tujuan keadilan sosial dengan tujuan efisiensi merupakan tujuan yang tidak dapat di persatukan, karena satu dengan yang lainnya bertolak belakang.

Perekrutan yang efektif menjadi sangat penting saat ini karena beberapa alasan. Pertama, terjadi perubahan yang dramatis di mana pada beberapa Negara muncul fenomena terjadi kekurangan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, beberapa metode perekrutan lebih baik dari yang lain, tergantung dari jenis pekerjaan. Ketiga, keberhasilan koordinasi akan tergantung pada luasan area masalah dan kebijakan koordinasi (Dessler, 2011: 162). Sering terjadi pada suatu informasi lowongan kerja, tidak banyak pelamar yang berminat untuk mengajukan lamarannya. Oleh karenanya, perusahaan yang menjadi harus peka terhadap kendala-kendala yang di hadapi atau Factor-faktor yang lazim di temukan dalam koordinasi meliputi :

1) Strategi Penarikan

Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi system rekrutmen yang di jalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik lebih suka melakukan model rekrutmen berdasarkan kedekatan kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola

promosi dan mutasi yang efektif, akan lebih suka melakukan pola koordinasi dari luar perusahaan.

2) Sumber Penarikan

Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan tertentu yang memiliki citra negative, sebaliknya pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi perusahaan-perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan maupun keunggulan dalam bidang usahanya.

3) Penyaringan

Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai koordinasi. Misalnya kebijakan status kepegawaian. Beberapa perusahaan yang lebih suka melakukan system kontrak dengan karyawan baru dalam jangka waktu yang lama, biasanya kurang di sukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi.

4) Rencana Data

Rencana strategis menunjukan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu di laksanakan oleh sumber daya manusia. Banyak perusahaan lebih suka koordinasi dari internal perusahaan dengan alasan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dari pada karyawan yang sama sekali baru.

5) Kumpulan Data

Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses perekrutan. Misalnya, pada suatu daerah yang surplus (kelebihan angkatan kerja) maka tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerjapun perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar.

6) Persyaratan pekerjaan

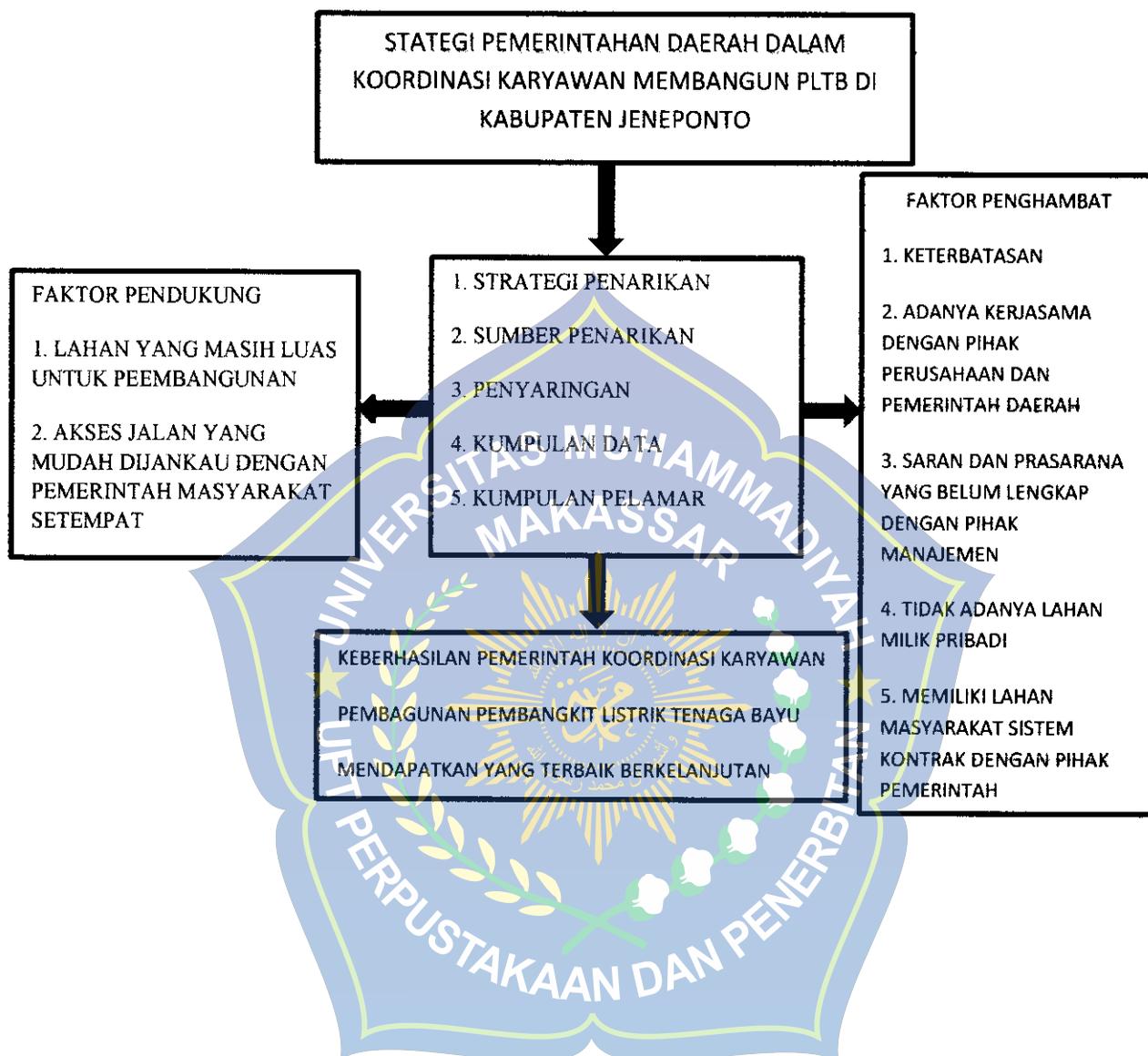
Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa-apa persyaratan yang di butuhkan untuk posisi yang di tawarkan

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian Karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses strategi pemerintah dalam koordinasi pembanguna PLTB di Kabupaten Jeneponto.



BAGIAN KERANGKA PIKIR



F. Fokus Penelitian

Dari judul penelitian ini yakni Strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Jeneponto, maka penulis memberikan focus pada penelitian ini terdiri dari beberapa Indikator untuk di jabarkan, di antaranya:

1. Strategi Penarikan
2. Sumber Penarikan
3. Penyaringan
4. Rencana Data
5. Kumpulan Pelamar

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas maka dapat kita kemukakan definisi:

1. Strategi Penarikan

Hal ini mempengaruhi desain dan implementasi system koordinasi yang di jalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik lebih suka melakukan model koordinasi berdasarkan kedekatan kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan mutasi yang efektif, PLTB Kabupaten Jeneponto

2. Sumber Penarikan

Untuk mendorong motivasi pegawai dari segi Lamanya Keanggotaan Organisasi (*Length of organizational membership*) upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan memperbesar peluang promosi pegawai ke jabatan yang lebih tinggi sehingga

pegawai merasa termotivasi untuk bisa memberikan Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan tertentu yang memiliki citra negative, sebaliknya pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi keperusahaan-perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan PLTB Jeneponto maupun keunggulan dalam bidang usahanya.

3. Penyaringan

Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai rekrutmen. Misalnya kebijakan status kepegawaian. Beberapa perusahaan yang lebih suka melakukan system kontrak dengan karyawan PLTB jeneponto baru dalam jangka waktu yang lama, biasanya kurang di sukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi.

4. Rencana Data

Rencana strategis menunjukan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan fungsi pekerjaan Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi atau hubungan antara penyedia layanan dan penerima layanan. Menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan itu. dalam hal ini pemerintah adalah lembaga yang memproduksi, mendistribusikan atau memberikan alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan publik yang perlu di laksanakan oleh sumber daya manusia. Banyak perusahaan lebih suka koordinasi dari internal perusahaan dengan alasan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik dari pada karyawan yang sama sekali baru.

5. Kumpulan Pelamar

Para tenaga kerja akan berpengaruh pada proses perekrutan. Misalnya, pada suatu daerah jeneponto yang surplus (kelebihan angkatan kerja) maka tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerja pun perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar PLTB Jeneponto.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini di laksanakan selama 2 bulan bertempat di Kabupaten Jeneponto dasar penelitian ini di lakukan agar kita mengetahui bagaimana strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni mendeskripsikan tentang strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

Tipe penelitian adalah fenomenologi yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang di teliti berdasarkan pengalaman yang telah di alami informan. Masalah yang akan di teliti strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana peneliti memperoleh data yang di perlukan selama melaksanakan penelitian.

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data empiris yang di peroleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Pada penelitian ini data yang di peroleh peneliti melalui hasil

wawancara atau tanyajawab langsung dengan informan yang terlibat dalam tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang di teliti berdasarkan pengalaman yang telah di alami informan. Masalah yang akan di teliti strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

2. Data Sekunder

Data yang di peroleh peneliti melalui dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis dan di kumpulkan yang di gunakan dalam penelitian tipe penelitian ini adalah fenomenologi yang di maksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang di teliti berdasarkan pengalaman yang telah di alami informan. Masalah yang akan di teliti strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang di anggap mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya mengenai pelaksanaan pelayanan. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pegawai, baik pimpinan maupun bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni:

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang benar-benar terjadi di PLTB kabupaten jenepono Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk memperoleh keterangan-keterangan data yang lebih akurat dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dan kenyataan yang terjadi di lapangan dalam hal pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

2. Dokumentasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku yang berkaitan erat dengan strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto. sehingga menunjang kerelevanan data. Metode dokumentasi di gunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang di gunakan pada penelitian ini di kemukakan oleh Miles dan A. Michael Hurman dalam Sugiyono(2012 : 92) memiliki tiga langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Reduksi data juga berarti komponen pertama dalam analisis

data yang memperpendek, mempertegas dan membuang hal yang dirasa tidak penting ataupun tidak berkaitan dengan focus penelitian sehingga penarikan kesimpulan dapat di lakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah bentuk rakitan data dalam uraian singkat. Menyajikan data yang sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini di maksudkan untuk memahami apa yang terjadi secara lebih mudah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiyono (2012:121) uji keabsahan data meliputi uji *kredibilitas data*, uji *transferability*, uji *depenability*, dan uji *confirmability*. Keabsahan data pada penelitian ini di periksa menggunakan uji kredibilitas data yang di lakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga triangulasi dalam keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang di katakan umum dengan yang di katakana pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada pada strategi pemerintah daerah dalam koordinasi karyawan di PLTB Kabupaten Jeneponto.

2. Triangulasi teknik.

Triangulasi teknik di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang di peroleh dengan teknik pengumpulan data sebelumnya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu di gunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi pada penelitian ini akan di adakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, sehingga data yang di peroleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Profil Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk daerah kabupaten Jeneponto menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). Dasar hukum penyusunan rencana kerja Pemerintah Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

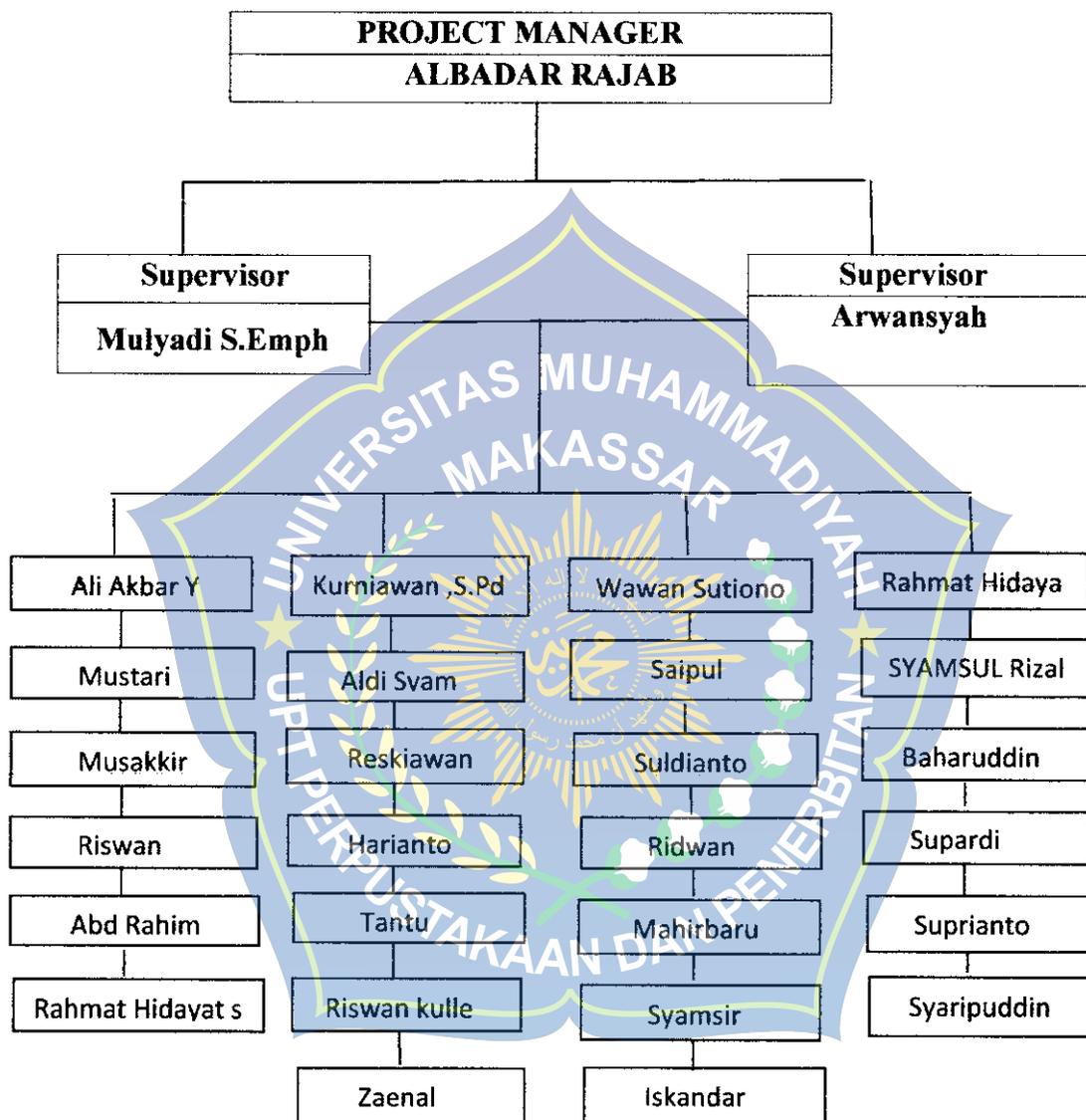
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 21 Oktober 2010, tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Buku IV) Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008 – 2028;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018;
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Buku I dan II sebagai Tindak Lanjut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2014



STRUKTUR ORGANISASI NAWAKARA PROJECT PLTB ENERGI BAYU
JENEPONTO

Tabel 1.2



B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi Pemerintah daerah dalam Koordinasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Kabupaten Jeneponto Transparansi adalah keterbukaan dan pertanggung jawaban dan terbuka untuk didiskusikan semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalah gunakan untuk kepentingan masyarakat dan lebih mengutamakan keterbukaan informasi sebagai bentuk dari wujud transparansi pemerintah terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu PLTB Kabupaten Jeneponto. Pemerintah yang terkait dalam pengelolaan Pembangunan kincir angin lebih memperhatikan transparansi dan membuka informasi yang terkait untuk umum agar tidak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat dan pengelola. Satu aspek yang terbaik adalah dengan adanya keterbukaan informasi atas proses kerja yang Salah berlangsung dan terlayani dengan baik dari pihak perusahaan sebagai suatu perusahaan publik yang bergerak dalam kebutuhan masyarakat dan pemerintah harus mampu memelihara kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan menerapkan konsep komunikasi dua arah antara pihak perusahaan dan terhadap PLN kedepannya pun perusahaan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dan hubungan yang harmonis dengan pihak yang membutuhkan jasa dan pemberi layanan jasa secara elektronik.

Walaupun transparansi merupakan hak pemangku kepentingan dan perusahaan wajib memberikan yang benar tapi harus pula dalam koridor catatan-catatan tertentu

karena ada hal yang harus menjadi perhatian sebagai rahasia perusahaan jadi tidak semua hal harus dijadikan keterbukaan publik perusahaan hanya berhak memberikan informasi yang sudah menjadi perjanjian secara komitmen terhadap keterbukaan publik atau yang telah diatur, sebuah perusahaan publik merupakan milik masyarakat umum bila perusahaan memberikan informasi yang belum siap maka perusahaan pasti tidak akan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ada. Namun budaya keterbukaan terhadap publik haruslah diatur dan dikelola dengan penuh integritas dalam penyajian transparansi sebagai wujud atas dasar pertanggungjawaban sebagai tata kelola lingkungan kerja yang lebih profesional.

Untuk lebih memperkuat penelitian ini maka dilakukan wawancara mendalam. Mengamati hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pembangunan Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sulawesi selatan yaitu di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Jeneponto, adanya administrasi yang tertata dengan baik dalam perusahaan tersebut Pembangkit Listrik ini mengkonversi energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin. Jenis pembangkit energi angin tergolong baru di Indonesia walaupun pembangkit energi angin sudah lama dimanfaatkan oleh Negara maju seperti Belanda, Inggris, Australia, dan lain-lain. Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap dan Jeneponto merupakan PLTB pertama di Indonesia yang terbesar, tidak banyak Negara di Asia yang memiliki pembangkit listrik jenis ini. Daya yang dihasilkan cukup besar yakni PLTB Sidrap dengan kapasitas 75 MW dan PLTB Jeneponto dengan kapasitas 60 MW.

Listrik yang dihasilkan dari pembangkit tersebut akan disalurkan ke PLN melalui jaringan interkoneksi Sulawesi Selatan. Jaringan ini menyambungkan ke saluran transmisi PLN 150 kV.

Sistem transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik (power plant) hingga ke saluran distribusi listrik sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik. Penyebab utama ketidakstabilan frekuensi adalah ketidakmampuan sistem tenaga untuk memenuhi permintaan daya aktif. Sedangkan beban sistem yang berupa daya aktif selalu berubah sepanjang waktu. Untuk mempertahankan frekuensi dalam batas toleransi yang diperbolehkan, penyediaan daya aktif (pembangkit) harus selalu disesuaikan dengan beban daya aktif yang diberlakukan agar tidak ada ketimpangan yang terjadi dalam sistem perusahaan saya kira demikian”(wawancara dengan informan Rahmat Hidayat,20 Agustus 2020.)

Dari sumber informan diatas sudah jelas bahwa proses yang diberlakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya yang ada dalam Pada pembangkitan tenaga listrik terdapat proses pengubahan sumber energi primer menjadi energi listrik yang diberlakukan oleh perusahaan dengan adanya pembangkit tenaga listrik mempunyai prinsip kerja yang berbeda, sesuai dengan prime movernya. Satu hal yang sama pada pembangkit tenaga listrik adalah semuanya berfungsi untuk mengubah energi mekanik

menjadi energi listrik dengan cara mengubah potensi energi mekanik yang berasal dari air, uap, gas, angin, panas bumi, nuklir, kombinasinya

a. Aksesibilitas Pentingnya Energi Listrik Bagi Perekonomian

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan dalam proses sebagaimana diketahui, energi listrik dipakai untuk berbagai keperluan mengukur bagaimana dalam proses pelayanan dan proses transaksi atau aksesibilitas meliputi ukuran kemudahan waktu biaya dan usaha dalam melakukan setiap proses transaksi dalam konsep aksesibilitas ini mengukur kemudahan dan kecepatan waktu dalam setiap saat transaksi yang dilakukan yang masih mengacu pada transparansi pengadaan barang dan jasa jika aksesibilitas tak berjalan dengan baik dalam Energi listrik dapat dipergunakan untuk menggerakkan macam-macam mesin dan

proses di pabrik dalam pencegahan tidak adanya keterbukaan di publik. Adapun hasil wawancara dengan salah satu narasumber mengenai aksesibilitas Lebih maju perekonomian Negara, lebih banyak energi listrik yang dipakai. Memang penggerak ekonomi secara keseluruhan adalah pemakaian energi secara umum: minyak, batu bara dan gas, akan tetapi di semua Negara, komponen listrik di dalam gambaran energy keseluruhan, terus menerus menunjukkan kecenderungan yang naik.

“ kalau kita berbicara masalah aksesibilitas saya kira disini sudah baik karena adanya konsep keseragaman harga yang sudah ditetapkan dan cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan itu mudah dan efisien. (wawancara dengan informan Wawan Sutiono 20 Agustus 2020.)

Dari penjelasan diatas saya dapat tarik kesimpulan bahwa dengan adanya untuk dapat mengoperasikan system tenaga listrik dengan baik dan kemudahan mendapatkan serta efisiensi waktu itu sudah cukup baik dan perlu peningkatan pelayanan dengan maksimal untuk mendukung kegiatan kerja yang ada dengan peningkatan kinerja dan pelayanan. Sejak dimulai rencana pembangunan lima tahun (replitan) perkembangan tenaga listrik di Indonesia mengalami kenaikan yang terus-menerus dengan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik setiap tahunnya diatas 10 persen, bahkan hingga 15 persen.(wawancara dengan informan Syamsul Rizal 20Juli 2020)

Tidak jauh berbeda dengan informan pertama pernyataan yang dilontarkan sepaham untuk menguji kejelasan maka kita beralih ke informan ke tiga sebagai berikut

“ memperhatikan tingkat efisiensi waktu dan kualitas barang dalam setiap transaksi yang ada merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan dengan kemudahan untuk mendapatkan barang tersebut adalah hal utama yang harus kami perhatikan dengan baik dan harus tepat sasaran Perusahaan listrik Negara (PLN).Oleh karena itu diperlukan upaya pencarian sumber listrik yang mudah dan sederhana yang dapat diusahakan oleh masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi yang ada. didapatkannya demikian. (wawancara dengan informan Supardi 20 Juli 2020)

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah meningkatkan suplai listrik, sehingga pemakaian listrik tidak hanya dirasakan di kota-kota, tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok desa untuk alat penerangan maupun usaha-usaha lain dibidang ekonomi. Pembangkit listrik tenaga bayu (angin) (PLTB) yang direncanakan ini akan dilihat dari aspek teknis,sehingga dapat ditentukan apakah PLTB tersebut

dapat memberikan sumbangan dan peran positif pada masyarakat (wawancara dengan informan Syarifuddin 20 Juli 2020)

Hal demikian tersebut adalah konsep keterbukaan terhadap pembangunan PLTB Jeneponto ini yang menjadi poin utama keterbukaan terhadap pelanggan, indikator aksesibilitas ini sebagai penulis saya dapat menarik kesimpulan bahwa sudah berjalan dengan baik namun untuk lebih baiknya lagi jika konsep dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, telah mencapai sekitar 65%. Saat ini, PLTB ini akan dipasang 20 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 3,6 megawatt (MW), sehingga total kapasitas pembangkit mencapai 72 MW.

a. perkembangan menyalurkan tenaga listrik dari beberapa pusat pembangkit tenaga listrik yang dikehendaki bekerja secara parallel Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam dunia usaha atau konteks pelayanan publik dikarenakan informasi adalah penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi keutamaan dalam memberikan informasi layanan produk atau pun syarat dan ketentuan yang ada didalamnya ini harus jelas sampai kepada publik mengenai informasi tersebut agar tidak terjadi ketimpangan dalam setiap pelayanan apalagi kalau kita berbicara masalah pelayanan publik harus secara kompleks jelas dan terpapar secara baik dalam memberikan keterbukaan informasi tersebut. Informasi sebagai hal yang pasti yang diterjemahkan kedalam berbagai informasi dan klarifikasi yang dapat

dipersempit dengan memberikan definisi penjelasan baik yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan atau secara elektronik dengan memperhatikan detail informasi dengan kelengkapan yang sangat terperinci dan jelas tanpa membingungkan orang yang ingin mendapatkan informasi tersebut untuk memberikan kejelasan informasi harus memperhatikan kecukupan objektifitas, ketersediaan, akurasi, kelengkapan informasi, dan harus ada kualitas data dalam isi informasi yang diberikan untuk memberikan kesan penegasan didalamnya sehingga hanya dengan melihat atau membaca informasi tersebut sudah dapat dipahami dengan baik tanpa harus bertanya atau mengklarifikasi informasi tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut.

“ kalau kita berbicara masalah kelengkapan informasi yah disini informasi biasa di dapatkan sangat mudah bahkan secara online pun bias dengan mengakses link <https://mediaindonesia.com/read/detail/187102-pembangkit-listrik-angin-jeneponto-selesai-november-2018>. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo I berkapasitas 72 MW di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara dengan informan Ridwam 05 Agustus 2020)

Penjelasan narasumber diatas memberikan penegasan bahwa kelengkapan informasi dan untuk mendapatkan informasi itu sudah sangat mudah didapatkan dengan cara mengakses link yang sudah disediakan oleh pihak yang terkait untuk memberikan kemudahan kepada publik dengan adanya link tersebut keterbukaan informasi milik semua orang yang ingin mendapatkan informasi yang akurat mengenai masalah perkembangan dikemudian hari, sistem interkoneksi ini sangat baik, bisa diandalkan dan merupakan sistem yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi.

untuk yang lebih jelasnya lagi sebelum menarik kesimpulan kita akan mengalih informasi terhadap beberapa narasumber lainnya penjelasannya sebagai berikut.

“yah kalau pun ada pelanggan yang ingin mendapatkan informasi baik itu datang secara langsung kepada kami, kita akan memberikan penjelasan dengan maksimal mungkin kita akan jelaskan dengan satu persatu secara jelas, dengan pendekatan langsung juga dengan pendekatan langsung juga boleh secara online juga bias didapatkan, kita disini akan memberikan arahan dan penjelasan demikian. (wawancara dengan informan Reskiawan 4 Agustus 2020)

Tidak jauh berbeda dengan informan diatas kalau ada yang data hanya sekedar mendapatkan informasi kita akan memberikan penjelasan secara langsung semua karyawan disini harus biasa memberikan penjelasan informasi yang ingin didapatkan oleh siapa pun itu tanpa terkecuali sesudah kami berikan penjelasan kita arahkan lagi untuk membuka link yang sudah disediakan yang bisa diakses secara online dimana pun keberadaan jika ingin mengetahui keterbukaan informasi tersebut demikian pak . (wawancara dengan MJ 05 Agustus 2020)

Informan selanjutnya adalah orang yang ingin menggunakan sistem interkoneksi Untuk pusat pembangkit yang mem-punyai kapasitas kecil dapat dipergunakan sebagai pembantu dari pusat pembangkit utama (yang mempunyai kapasitas tenaga listrik yang besar). Apa bila beban normal sehari-hari dapat diberikan oleh pusat pembangkit tenaga listrik tersebut, sehingga ongkos pembangkitan dapat diperkecil. Pada sistem interkoneksi ini pusat pembangkit tenaga listrik bekerja bergantian secara teratur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada pusat pembangkit yang bekerja terus-menerus. Cara ini akan dapat memperpanjang umur pusat pembangkit dan dapat menjaga kestabilan sistem pembangkitan. (wawancara dengan informan Herianto 10 Agustus 2020)

Penjelasan beberapa sampel informan diatas dapat saya ambil kesimpulan bahwa kelengkapan dan kejelasan informasi yang ada sudah baik dan terbuka untuk publik dengan mengakses link yang sudah disediakan oleh pihak yang terkait sehingga semua bisa tanpa terkecuali dan dimana pun tempatnya dapat mendapatkan mempunyai pontensi angin cukup besar. Sehingga didirikan pembangkit energi listrik tenaga bayu/angin yang merupakan energi terbarukan. Kincir angin raksasa PLTB Tolo 1 tersebut merupakan bagian dari proyek percepatan pembangunan pembangkit 35.000 MW. Proyek itu sendiri, tak lain merupakan bagian dari upaya pemerintah mencapai target bauran energi nasional 23 persen dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025. Namun, selain menjadi pemasok energi, PLTB Tolo 1 rupanya juga menjadi alternatif wisata.

Di tempat ini, kita bisa menikmati semilir angin secara terbuka dan melihat kincir angin raksasa. Panorama di sekitar PLTB Tolo 1 juga tak kalah menakjubkan. Di PLTB ini, bakal menyaksikan deretan kincir angin raksasa terpadu dengan hamparan pemandangan hijau dari areal persawahan yang sangat luar biasa.

Kunjungan ke PLTB Tolo 1 sendiri, menjadi semakin ramai sejak tempat tersebut diresmikan pada November 2018 lalu. Tak hanya kawula muda yang *demen* berkunjung, tetapi juga para orang tua atau keluarga dan teman-teman. Baling-balingnya pun tampak unik, karena dari kejauhan seperti baling-baling pesawat. Sekilas, cuaca ini seperti di Negeri Kincir Angin, Belanda.

Pastinya, terpaduan keunikan baling-baling dan pemandangan sangat cantik itu, cocok menjadi latar belakang berswa foto. Tak hanya pengunjung yang sengaja datang berkunjung saja yang menyempatkan berselfie, tetapi juga para pengendara yang melintas di sekitar PLTB Tolo 1. Mereka tak segan memberhentikan kendaraan mereka dan sejenak berselfie di area berlatarkan kincir raksasa dan persawahan luas itu.

Saat musim kemarau atau cuaca bersahabat, tempat ini menjadi lebih riuh. Pasalnya, banyak pengunjung yang sengaja datang untuk menyaksikan panorama senja di PLTB ini. Selain pemandangan sang mentari yang hendak pulang ke peraduannya itu, di PLTB Tolo 1 pemandangannya juga lebih menarik di kala sore hari, karena banyaknya kerlap kerlip lampu yang menyala.

Selain cocok dikunjungi para penikmat wisata santai, PLTB Tolo 1 juga cocok dikunjungi oleh para penyuka wisata adventure atau petualangan. Di kawasan PLTB Tolo 1 ini, terdapat jalan yang menghubungkan dengan lokasi kincir angin. Nah, jalanan tersebut cocok dijadikan medan memacu adrenalin bagi para pemotor trail. (wawancara dengan informan Baharuddin 10 Agustus 2020)

Informan yang berbeda kita galih informasi sebagai berikut.

Listrik yang dihasilkan PLTB Tolo 1 akan disalurkan ke sistem transmisi PLN dengan tegangan 150 kilovolt (kV). Untuk penyaluran tenaga listrik, telah dibangun satu substation baru, yakni Substation Tolo, dan modifikasi pada substation PLN Jeneponto.

Selain itu, dua transformator telah dipasang dengan kapasitas masing-masing 45 volt-ampere (VA). Estimasi produk listrik PLTB Tolo ialah 198,6 gigawatt (GW) per tahun, dengan kecepatan angin 6 meter per detik (m/s) dan capacity factor 30%. PLTB Tolo). Adapun hasil wawancara dengan informan sebagai berikut Pembangkit tersebut merupakan bagian Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW sekaligus bagian dari upaya pemerintah mencapai target bauran energi nasional 23 persen yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2025. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Jonan mengapresiasi progres pembangunan PLTB Tolo I yang saat ini telah mencapai 96,68 persen atau lebih cepat dari yang sudah ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya. "Saya mengucapkan terima kasih, ini proyek progresnya baik, penyelesaiannya lebih cepat beberapa bulan dari yang sudah ditargetkan dan juga saya sangat berkesan dengan adanya kerja sama dan kontribusi yang baik dengan masyarakat sekitar, (wawancara dengan informan Ibrahim 10 Agustus 2020).

Selain target penyelesaian proses konstruksi yang lebih cepat dari target, Jonan juga mengapresiasi kerja sama PT Energi Bayu Jeneponto, pengembang PLTB Tolo I, dengan masyarakat dalam bentuk tanggung jawab sosial kemasyarakatan (corporate social respon).

"Kerja sama pihak manajemen PLTB Tolo I dengan masyarakat menurut saya bisa dijadikan percontohan, karena masih banyak juga proyek pembangunan besar di bidang kelistrikan juga energi, kerja samanya luar biasa, kita mengucapkan banyak terima kasih," lanjutnya. PLTB Tolo I berlokasi di Kampung Lengke-lengkes,

Kecamatan Binamu, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Pembangkit tersebut memiliki 20 turbin, yang masing-masing pelat berkapasitas 3,6 MW dengan panjang blade 63 meter.

Nantinya, pembangkit berbasis angin tersebut akan terkoneksi dengan jaringan transmisi sebesar 150 kV. Sebanyak 4 dari 10 tower transmisi 150 kV telah selesai dibangun, yang akan terinterkoneksi melalui Gardu Induk Jeneponto. Sedangkan control dan service building masih dalam proses pengerjaan. PLTB Tolo-I dihasilkan dari kecepatan angin sebesar 6 m/s yang merupakan potensi angin cukup besar untuk dikembangkan secara komersial. Penandatanganan jual beli atau Power Purchase Agreement (PPA) diteken oleh Perusahaan Listrik Negara bersama PT. Energi Bayu Jeneponto sejak tanggal 14 November 2016 dengan harga jual listrik 10,89 USD cent/kWh. Berdasarkan PPA tersebut, proyek akan selesai dan Commercial Operation Date (COD) pada 14 November 2019. Hadirnya PLTB Tolo-I Jeneponto akan melengkapi keberadaan PLTB Sidrap untuk meningkatkan kontribusi energi berbasis angin di Indonesia, disamping semakin meningkatkan kehandalan kelistrikan di Sulawesi Selatan, yang saat ini rasio elektrifikasinya telah mencapai 99,12 persen.

Regulasi merupakan konsep penerapan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang harus jelas penerapannya sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi terhadap publik meliputi tugas fungsi dan kewenangan dalam menjalankan tugas dalam suatu lembaga baik itu pemerintahan atau pun swasta yang sudah ditentukan dalam Pemerintah yang disepakati dengan demikian akan teratur dan

tertata dengan baik segala mekanisme yang ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam suatu system kerja yang sedang berjalan dan pelayanan menjadi semakin baik.

Dalam indikator ini merupakan salah satu tolak ukur yang harus mendapat perhatian penuh untuk mengetahui apakah kerangka regulasi ini berjalan dengan baik kita perhatikan penjelelasan informan sebagai tolak ukur sebagai berikut.

“kalau masalah kerangka regulasi saya rasa sudah jelas dan tepat mengingat aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah fungsi karyawan juga sudah berjalan dengan baik dalam pekerja kita juga membagi dengan jelas tugas dan fungsinya dan masalah keterbukaan informasi itu sudah mudah untuk diakses dan mendapatkan informasi dengan cepat. (wawancara dengan informan Saipul 6 Juli 2020). Mengkaji penjelasan narasumber diatas sudah baik tapi kita simak dengan informan yang lain untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sebelum menarik kesimpulan.

Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

konstruksi wind power di Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto, Sulawesi Selatan, kedua setelah PLTB Sidrap Selasa (29/5). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan PLTB Jeneponto siap beroperasi pada pertengahan 2019 mendatang dengan koordinasi yang baik dari pihak dalam yang memberikan petunjuk dengan transparan”(wawancara dengan informan Iskandar 14 Agustus 2020)

Tidak jauh berbeda argumen yang dijelaskan narasumber selanjutnya.

“yah kalau ada yang bertanya masalah regulasi dan penerapan terhadap kami yah kami akan memberikan penjelasan dengan baik tentunya dengan mekanisme yang baik pula karena menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh orang kan adalah tugas kami memberikan petunjuk tapi dengan aturan yang ada tidak juga dianjurkan untuk memberikan jawaban yang memihak terhadap satu pihak intinya kita harus menjalin

kerja sama antar individu yang tidak merugikan yang lain. (wawancara dengan informan Zaenal 15 Agustus 2020)

Dari penjelasan narasumber diatas untuk beberapa bagian dalam konsep regulasi ini berjalan dengan baik tugas dan fungsi dalam sistem kerja sudah jelas pembagian kerjanya karena dalam sistem regulasi harus ada koordinasi yang baik antara perusahaan dan semua elemen pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut apa lagi ini adalah regulasi dalam sistem tata kelola pelayanan publik tentunya regulasinya harus jelas dan tepat karena berkaitan dengan kepentingan umum atau masyarakat banyak.

Adapun wawancara dengan info berikut menegaskan.

“ pelayanan ini adalah pelayanan kompleks dimana kita harus memperhatikan kepentingan umum karena dalam sistem kerja jasa pengadaan barang secara online ini berbicara masalah regulasi pemerintah untuk kepentingan umum jadi tidak sembarangan merumuskan regulasi apa lagi harus mengacu pada konsep transparansi atau keterbukaan publik saya rasa demikian. (wawancara dengan informan Kurniawan S.Pd.I 15 Agustus 2020)

Tidak jauh berbeda dengan informan selanjutnya.

“yah jelas namanya regulasi yah berbicara masalah tugas dan fungsi dalam tugas dan fungsi tersebut tidak boleh sembarangan karena setiap kerangka kerja terkonsep dan tertata dengan rapi supaya karyawan dalam melakukan tugasnya tidak tumpukan karena masing-masing sudah jelas tugasnya masing-masing untuk menjamin transparansi dalam bekerja jika demikian akan jelas jika ada salah satu tugas dan fungsi tidak berjalan dengan baik akan terlihat dari segi mana yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya dengan demikian dapat diambil tindakan yang tegas untuk memperbaiki kesalahan yang ada.(wawancara dengan Arwansyah SS 15Agustus 2020)

Dari berbagai informan yang ada dengan mempertimbangkan informasi yang diberikan pada penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kerangka regulasi sudah

berjalan dengan baik dan penerapannya sudah tepat dengan berbagai aturan yang telah diterapkan dalam sistem organisasi dalam pembagian tugas dan fungsi serta transparan dan terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin mendapatkan informasi mengenai infrastruktur kelistrikan dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, dan pemerataan industri, yang berdampak lanjutan bagi penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pembangunan PLTB Kabupaten Jeneponto

"Proses terus berjalan, targetnya pada pertengahan tahun ini pekerjaan fisik PLTB Jeneponto akan selesai, sekitar Juli atau Agustus nanti. Sementara COD (commercial operation date) akan dilakukan setelah selesainya persiapan dalam mengintegrasikan listrik yang dihasilkan PLTB ke jaringan PLN," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Pemerintah. Pasokan listrik dari energi angin dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tambahan pasokan listrik tersebut mencapai 72 Mega Watt (MW).

Direktur PLN Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Djoko Rahardjo Abumanan, mengatakan bahwa setelah PLTB Sidrap yang beroperasi tahun lalu, pasokan listrik tenaga angin di Indonesia akan bertambah dari PLTB Jeneponto yang di jadwalkan beroperasi September 2019

"Jeneponto itu hampir sama dengan Sidrap, dalam RUPTL COD (beroperasi) tahun ini," dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tambahan pasokan listrik tersebut mencapai 72 Mega Watt (MW).

jika terjadi kejanggalan atau kesalahan mudah untuk dideteksi dan melakukan pertanggungjawaban. Dan untuk mengukur hal tersebut penulis akan melakukan pengumpulan informasi terhadap informan yang sudah ditentukan

Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ kita sebagai orang yang menggunakan jasa pengadaan barang elektronik ini sangat merasa terbantu dengan adanya link yang disediakan yang dapat kasi akses kapan saja dan semua informasi yang ada kita butuhkan dapat kita lihat dalam link tersebut dan setiap pengumuman pemenangan lelang dapat dilihat dalam link tersebut. (wawancara dengan informan Suardi 18 Agustus 2020)

Adapun faktor yang menghambat dalam perusahaan adalah seperti yang dijelaskan informan berikut.

“kalau mengkaji masalah sesuatu yang menjadi hambatan dalam pelayanan kami adalah kurangnya SDM yang ada sehingga terkadang kami merasa kuwalahan dalam malakukan pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi atau yang ikut dalam lelang barang. (wawancara dengan Mustari 18 Agustus 2020)

Tidak jauh berbeda dengan informan sealnjutnya yang mengatakan.

“kalau masalah faktor pendukung dan penghambat pasti ada namanya juga dalam proses kerja pasti ada konflik yang harus diselesaikan secara internal kita disini melakukan keterbukaan secara maksimal semua informasi bisa didapat dengan mudah hanya dengan mengklik link yang sudah disediakan dan kami juga melayani secara langsung merupakan capaian bagi PLN, menjadi PPA ke-4 pada 2018 untuk pengembangan EBT.

"Kami sangat bersyukur perjanjian ini dapat ditanda tangani hari ini. Pemerintah sangat komit untuk membangun Energi Baru Terbarukan. Ini juga merupakan sebuah achievment bagi PLN, (wawancara dengan informan Ayu 18 Agustus 2020)

Faktor pendukung dan penghambat menentukan jalannya suatu lembaga pemerintahan ataupun swasta bagaimana proses pemecahan masalah yang ada didalamnya untuk kelangsungan keberhasilan dan kepuasan terhadap publik. Dari hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan faktor pendukung adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo I berkapasitas 72 megawatt (MW) yang berlokasi di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencapai 96,68%. PLTB Tolo ditargetkan siap beroperasi (commercial operation date/COD). PLTB Tolo I merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit 35.000 MW sekaligus bagian dari upaya pemerintah mencapai target bauran energi nasional 23% yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) pada 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengapresiasi proses pembangunan PLTB Tolo I lebih cepat dari yang sudah ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menikmati manfaatnya. “Saya mengucapkan terima kasih, ini proyek progresnya baik, penyelesaiannya lebih cepat beberapa bulan dari yang sudah ditargetkan dan juga saya sangat berkesan dengan adanya kerja sama dan kontribusi yang baik dengan masyarakat sekitar.

1. Tugas operasi kantor

Warga Negara Indonesia (WNI) Pria atau Wanita berusia maksimal 20-30 Tahun, pendidikan Minimal S1-S2 diutamakan lulusan Sarjana, Memiliki lisensi tugas operasi kantor Resmi, dan memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, dan bersedia sesuai bidang dalam peraturan Kantor.

2. Mitra Bisnis Sumber Daya Manusia

Maksimum usia 30 Tahun pendidikan minimal S1-S2 Jurusan Manajemen/Administrasi, Bisnis Legal/ Teknik Industri/ Psikologi, Pengalaman di Human Capital Manajemen minimal 1-2-3 Tahun, memiliki keahlian analitik dan intrapersonal yang baik.

3. Petugas Pengawas

Berusia minimal 27 Tahun, Pendidikan Minimal S1-S2 Jurusan Psikologi/ Manajemen/ Administrasi Bisnis/ Konseling, Pengalaman Minimal 1-2-3 Tahun di Recruitment dan Selection Proses, memiliki pengetahuan luas di tes psikologi dan memiliki keahlian analitik dan interpersonal yang baik,

4. Spesialist Human Capital (Hubungan Industrial)

Usia maksimal 30 Tahun, Pendidikan Minimal Sarjana Hukum dan pengalaman minimal 1-2-3 Tahun di Industrial Realtion, memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik dan memiliki analitik dan imterpersonal yang baik.

5 Spessialis Web Sumber Daya Manusia

Usia maksimal 30 Tahun

Minimal pendidikan Sarjana Jurusan Ilmu Komputer/Teknologi/ Informasi dan Sistem Informasi, Berpengalaman membuat aplikasi Web menggunakan HTML/CSS, PHP, JavaScript, JQuery and API's *Practices*, membuat program dengan MySQL, SQL server dan *me-manage webservices* (REST, SOAP, dan lainnya)

Memiliki keahlian analitik intrapersonal yang baik.

6. Specialis HR (Kompensasi dan tunjangan)

Usia maksimal 30 tahun

Pendidikan maksimal serjana jurusan Sumber Daya Manusia atau sejenis

Diutamakan yang bersertifikat HR

Pengalaman 1-2-3 tahun sebagai analis kompensasi

Memiliki keahlian analitik dan intrapersonal yang baik

7. Pengalaman Kerja

Seorang Wanita berpengalaman sebagai FA (Rated A320, A330, ATR) dan berpengalaman

non-Rated

Usia maksimal 33 tahun

Tinggi badan minimal 160 cm

Memegang Flight Attendant Certificated (FAC)

8. Memilkiki syarat-syarat menjadi pegawai kontrak dikantor pltb yitu.

1. Memiliki Daftar Riwayat Hidup

2. Memiliki Surat Lamaran Kerja
3. Memiliki kartu keluarga (kk)
4. Memiliki akte kelahiran
5. Memiliki Identitas diri ktp
6. Memiliki (SKCK)
7. Memiliki Ijazah S 1-S 2
8. Memiliki pas foto terbaru
9. Memiliki (SKIL)
9. Memiliki beberapa orang pegawai kontrak yang ditetapkan oleh kantor Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yaitu adalah sebanyak 14 orang didalam Kantor pltb Desa lengkes-lengkes, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Jumlah seluruh pegawai kontrak PLTB banyak 14 orang
10. Memiliki syarat-syarat menjadi pegawai kontrak sucuity di kantor pltb yaitu.
 1. Memiliki Daftar Riwayat Hidup
 2. Memiliki Surat Lamaran Kerja
 3. Memiliki kartu keluarga (kk)
 4. Memiliki akte kelahiran
 5. Memiliki identitas diri ktp
 6. Memiliki (SKCK)
 7. Memiliki Ijazah SMA-S 1
 8. Memiliki pas foto terbaru

9. Memiliki (SKIL)

11. Memiliki berapa-berapa orang pegawai kontrak yang ditetapkan oleh kantor Pltb bayu angin seperti sucruity memiliki sebanyak 29 orang untuk salah satu Bagian menjaga Keamanan dalam kantor pltb bayu angin di Desa lengkes-Lengkes Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan.

Jumlah seluruh pegawai kontrak sucruity sebanyak 29 orang PLTB

Pada keseluruhan pegawai kontrak semua jumlah sebanyak 43 totalnya Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan .



BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi angin sangat besar sehingga didirikan PLTB di daerah tersebut dengan kapasitas 72 MW. PLTB ini akan dipasang 20 turbin angin dengan masing-masing kapasitas 3,6 megawatt (MW), sehingga total kapasitas pembangkit mencapai 72 MW. dengan 60 baling-baling dengan jenis sovanius (three blade) upwind memiliki rotor yang menghadap arah.

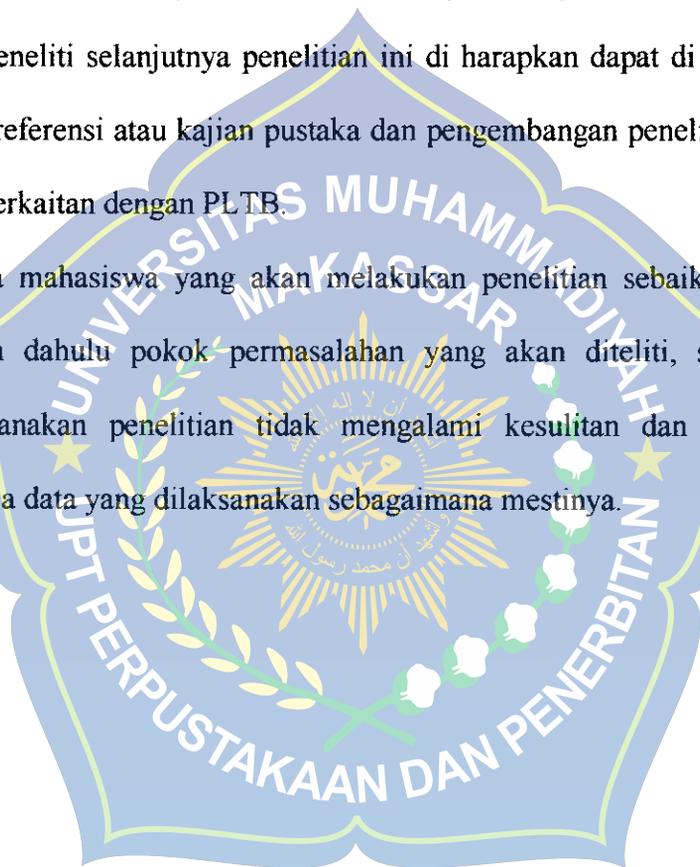
Perlu juga adanya peningkatan kualitas pelayanan secara langsung dan peningkatan angin dengan panjang 63 m dan tinggi tower 135 m. Kecepatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dari hasil penelitian dan riset yang dilakukan secara ilmiah dapat saya simpulkan bahwa semua proses kerja sudah berjalan dengan baik dan transparansi yang cukup memuaskan untuk publik dengan keterbukaan yang ada dalam sistem perusahaan tersebut yang memaparkan secara umum hal-hal yang dapat diketahui secara umum demi kepentingan umum.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada proyek pembangunan PLTB di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto di sadari bahwa daerah ini mempunyai potensi Energy angina yang sangat tinggi sebagai berikut :

1. Untuk daerah Jeneponto terkhususnya kecamatan Binamu manfaatkan potensi energi angin dengan penambahan pembangkit energi listrik tenaga angin.
2. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka dan pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan PLTB.
3. Kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebaiknya memahami terlebih dahulu pokok permasalahan yang akan diteliti, sehingga dalam melaksanakan penelitian tidak mengalami kesulitan dan kendala dalam mengola data yang dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, L.H. 2017. Studi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Yang (PLTB) Terletak di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
- Daryanto, y . 2013 . Kajian Potensi Angin Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu . Yogyakarta: Balai PPTAAG
[https://Indonesia.wordpress.com/2013/05/21/prinsip Kerja Pembangkit listrik tenaga bayu \(PLTB\) dan Perkembangannya di dunia](https://Indonesia.wordpress.com/2013/05/21/prinsip-Kerja-Pembangkit-listrik-tenaga-bayu-(PLTB)-dan-Perkembangannya-di-dunia)
- Ali Mufiz.2014. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Pusat: Penerbitan Universitas Terbuka.
- Labolo, Muhadam.2013. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press Jakarta Indonesia.
- Nicholas, Henry, 1988. Administrasi Negara: Dan Masalah-Masalah Kenegaraan, Jakarta:
- Sutarto, Drs. 1991. Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kordi, 2013. HAM tentang hak sipil, politik, Ekonomi, Sosial Budaya & Umum Graha ilmu, Yogyakarta.
- Setiyono, B. 2012, Birokrasi dalam perspektif Politik dan Administrasi Penerbit Nuansa, Bandung.

Ridwan Achmad. 2014. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik Bandung.

Islamie, Zamhir, Ryaas Rasyid. 2013. Pembangunan Politik dan Birokrasi Pemerintah. Jakarta: IIP.

Zainuddin ,Nyarrang. 2013. Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi Unismuh Makassar Sulawesi Selatan

Wajong, J. 2013. Fungsi Administrasi Negara. Jakarta: Jambatan

Supriatna, Tjahya. 2017. Akuntabilitas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik. di Bandung

Umar Husain. 2015. Sumber Daya Manusia dalam Organisasi PT Gramedia Jakarta.

Henry, Nicholas. 2013. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Jakarta: Rajawali.

Santoso, Amir. 2014. Politik Kebijakan dan Pembangunan. Jakarta: Dian Lestari Grafika

Sugiyono. Alfabeta. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D. Cetakan ke-20. Bandung.